

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Anoraga, Pandji, 1995, *BUMN swasta dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi*, Pustaka Jaya, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Harahap, M Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.Salim H.S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas ; Doktrin Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi*, Total Kreasi Media, Yogyakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2018, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.

Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti , Bandung.

Marsudi, D, 2005, *Pembangkit Energi Listrik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Petersen Harper & Row Publisher, H Graig, 1981, *Business and Government*, New York.

Pramono, Nindy, *Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN*, dalam Sri Rejeki Hartono, et.al, ed, 2006, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis: Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Tanpa Penerbit, Jogjakarta

Prasetya, Rudhi, 2011, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Purwosutjipto, HMN, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Djambatan, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung

Rasyid Saliman, Abdul, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.

Rawls, John, 1995, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Robson, William A, 1962, *Nationalized*, George Allen & Unwin Ltd, London.

Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Jakarta.

Soetikno, 2002, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dkk, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaya, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Yogyakarta.

### **Artikel Jurnal**

A.M. Tri Anggraini, “Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.

David S. Jones, “Public Procurement In Southeast Asia, Challenge and Reform”, *Journal of Public Procurement*, Volume 17, 2007.

Ding Maozhong, “On China’s Adoption of Competition Neutrality Policy”, *Competition Policy International*, November 2015.

Fuad Bawazier, “Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas Sumber Daya Manusia Pada Badan Usaha Milik Negara”, *Majalah Manajemen & Usahawan Indonesia* No.7 Tahun XXI Juli 1992.

Inda Rahadiyan, “Kedudukan BUMN Persero sebagai *Separate Legal Entity* dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 20 No.4 Oktober 2013.

Khi V. Thai, “Public Procurement Re-examined”, *Journal Of Public Procurement*, Volume 1, Issue 1, 2001.

Merdiansa Papatungan, “Diskursus Kewenangan Audit BPK Terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29 Nomor 3 Oktober 2017.

Nghia Tang Van, “Competitive Neutrality : Chalenges of Application for Vietnam”, *World Trade Institute*, Universitat Bern, Working Paper No 19/2016 Desember 2016.

Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, 2009.

Peter Mahmud Marjuki, “Batas-Batas Kebebasan berkontrak”, *Majalah Yuridika*, Vol.18, Nomor 3, Mei 2003.

Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum*, Volume 16 No.1 Januari Tahun 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (PP 45/2005) Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER - 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Perusahaan Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Perusahaan Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 253/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU No.2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) UU Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

### **Peraturan PT PLN (Persero)**

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 241.K/DIR/2012 Tentang Pemetaan Proses Bisnis PT PLN (Persero).

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0527.K/DIR/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Persero, 2016, Buku Pedoman *Good Corporate Governance* PT PLN (Persero), PT PLN (Persero), Jakarta.

Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang diperbarui dengan Edaran direksi Nomor 0014.E/DIR/2014 Tentang Perubahan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0003.E/DIR/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) yang diperbarui dengan Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.E/DIR/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero).

RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2016 s.d 2025.

### **Putusan**

Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-L/2006 tentang Penunjukan Langsung dalam Proyek Logo Baru Pertamina, tanggal 13 September 2006.

Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2006 tentang Penunjukan Langsung dalam Proyek CIS-RISI PLN, tanggal 27 September 2006.

### **Referensi Internasional**

OECD, 2009, *State Owned Enterprises and the principal of competitive neutrality*, OECD Publishing.

OECD, 2009, *Principles For Integrity in Public Procurement*, OECD Publishing.

OECD, 2012, *Competitive Neutrality : Maintaining a level playing field between public and private business*, OECD Publishing.

OECD, 2012, *Competitive Neutrality, National Practices*, OECD Publishing.  
OECD, 2018, *Ownership and Governance of State-Owned Enterprise: A Compendium of National Practices*, OECD Publishing.

UNCTAD, 2014, *Competitive neutrality and its application in selected developing countries*, Research Partnership Platform, United Nations, Geneva.

### **Hasil Penelitian**

Matthew Rennie, Fiona Lindsay, 2011, *Competitive Neutrality and State-Owned Enterprises in Australia: Review of Practices and Relevance for Other Countries*, OECD Corporate Governance Working Papers No.4, OECD Publishing.

Irmaya, Thia, 2017, *Sistem Penunjukkan langsung Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sugiharto, Muhammad Erry, 2018, *Analisis Kesesuaian Hukum Dalam Proses Penunjukan Langsung Hutama Karya Infrastruktrur Pada Proyek Jalan Tol Sumatera Terhadap Perundang-undangan terkait*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Jakarta Universitas Gadjah Mada, Jakarta.

### **Makalah Hasil Seminar**

Erman Suparman, 2014, *Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang/Jasa*, Makalah disajikan pada “Seminar Pembahasan Teknis Megenai Masukan Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor”, diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Jakarta 20 November 2014.

### **Hasil Wawancara**

Alfred Artur Agaton Sirait, Pertanyaan dan hasil wawancara : Pertimbangan yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan penunjukkan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, responden merupakan Assistant Analyst Kontrak I pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat, diisi pada 25 Februari 2019.

I Ketut Agus Dwipayana, Pertanyaan dan hasil wawancara : Pertimbangan yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) untuk melakukan penunjukkan langsung kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, responden merupakan Assistant Analyst

Pelaksana Pengadaan pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat, diisi pada 25 Februari 2019.

### Website

<https://kbbi.web.id>

<http://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn> diakses pada tanggal 12 Maret 2015

Fachry Ali, Induk BUMN <https://kompas.id/baca/opini/2018/02/09/induk-bumn/> diakses 23 Februari 2019.

“HIPMI Kecam Monopoli Dalam Pembangunan Infrastruktur”, <https://www.suara.com/bisnis/2017/09/13/020000/hipmi-kecam-monopoli-bumn-dalam-proyek-infrastruktur> diakses tanggal 21 Oktober 2018.

“LPJKN Tolak Penunjukan Langsung BUMN”, <https://www.merdeka.com/uang/lpjkn-tolak-sistem-penunjukan-langsung-proyek-bumn-x8l4vgw.html> diakses tanggal 21 Oktober 2018.

“Sinergi BUMN Institute bantah BUMN Monopoli Proyek Nasional”, <https://www.suara.com/bisnis/2017/09/15/050000/sinergi-bumn-institute-bantah-bumn-monopoli-proyek-nasional> diakses tanggal 21 Oktober 2018.